



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI SUMATERA UTARA

MENURUT PENGELUARAN 2013-2017





PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI SUMATERA UTARA

MENURUT PENGELUARAN 2013-2017

**Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Sumatera Utara
Menurut Pengeluaran 2013-2017**

ISSN : 2356-122x

No. Publikasi : 12550.1703

Katalog : 9302002.12

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 89 halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Dicetak oleh:

C.V. Rilis Grafika

"Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik"

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran 2013-2017

Tim Penyusun

Penanggung Jawab Umum : Dr. Syech Suhaimi
Penanggung Jawab Teknis : Bismark Saor Pardamean, M.Eng
Editor : Joni Mulyasri, SSi, M.Si
Penulis & Pengolah Data : Sri Juliana Siburian
Desain/Layout : Brian Firdian, SST

<https://sumut.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran 2013-2017 merupakan publikasi yang diterbitkan secara tahunan. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor serta Impor.

Kepada seluruh anggota tim penyusun publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang. Kritik dan saran perbaikan selalu diharapkan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Medan, Juli 2018

Kepala,



Dr. Syech Suhaimi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2. Kegunaan PDRB	4
II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	15
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	18
2.5 Perubahan Inventori	23
2.6 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa	27
III TINJAUAN PEREKONOMIAN SUMATERA UTARA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN, 2013-2017	29
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Sumatera Utara menurut Pengeluaran ..	31
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	37
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	42
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	43
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	48
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	51
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	52
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa	54

IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT PENGELUARAN 2013-2017	57
	4.1 PDRB (Nominal)	59
	4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	60
	4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB.	61
	4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	62
	4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	63
	4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor	64
	4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	65
	4.8 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	66
	4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	67
	4.10 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	69
V	PENUTUP	71
VI	TABEL-TABEL	76
	DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017	32
Tabel 3.2. PDRB ADHK 2010 Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017	33
Tabel 3.3. Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Utara ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017	34
Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017	35
Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017	37
Tabel 3.6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	38
Tabel 3.7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	40
Tabel 3.8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	41
Tabel 3.9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	42
Tabel 3.10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	43
Tabel 3.11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	45
Tabel 3.12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun, 2013-2017	47
Tabel 3.13. Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017.....	49
Tabel 3.14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013-2017	51
Tabel 3.15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	53

Tabel 3.16	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	55
Tabel 4.1	PDRB dan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	60
Tabel 4.2	Perbandingan PDRB Menurut Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	61
Tabel 4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	62
Tabel 4.4	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	63
Tabel 4.5	Rasio Ekspor terhadap PMTB Provinsi Sumatera Utara ADHB Tahun 2013-2017	64
Tabel 4.6	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	64
Tabel 4.7	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	65
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	67
Tabel 4.9	Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017.....	68
Tabel 4.10	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017.....	70
Tabel 6.1	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara ADHB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2013-2017.....	77
Tabel 6.2	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2013-2017.....	78
Tabel 6.3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara ADHB Menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Persen)	79
Tabel 6.4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Persen)	80

Tabel 6.5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara ADHB Menurut Pengeluaran (Persen), 2013-2017	81
Tabel 6.6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2013-2017.....	82
Tabel 6.7	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara ADHB Menurut Pengeluaran (2010=100), 2013-2017 (Persen)	83
Tabel 6.8	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Persen).....	84
Tabel 6.9	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Persen)	85
Tabel 6.10	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran (2010=100), 2013-2017.....	86

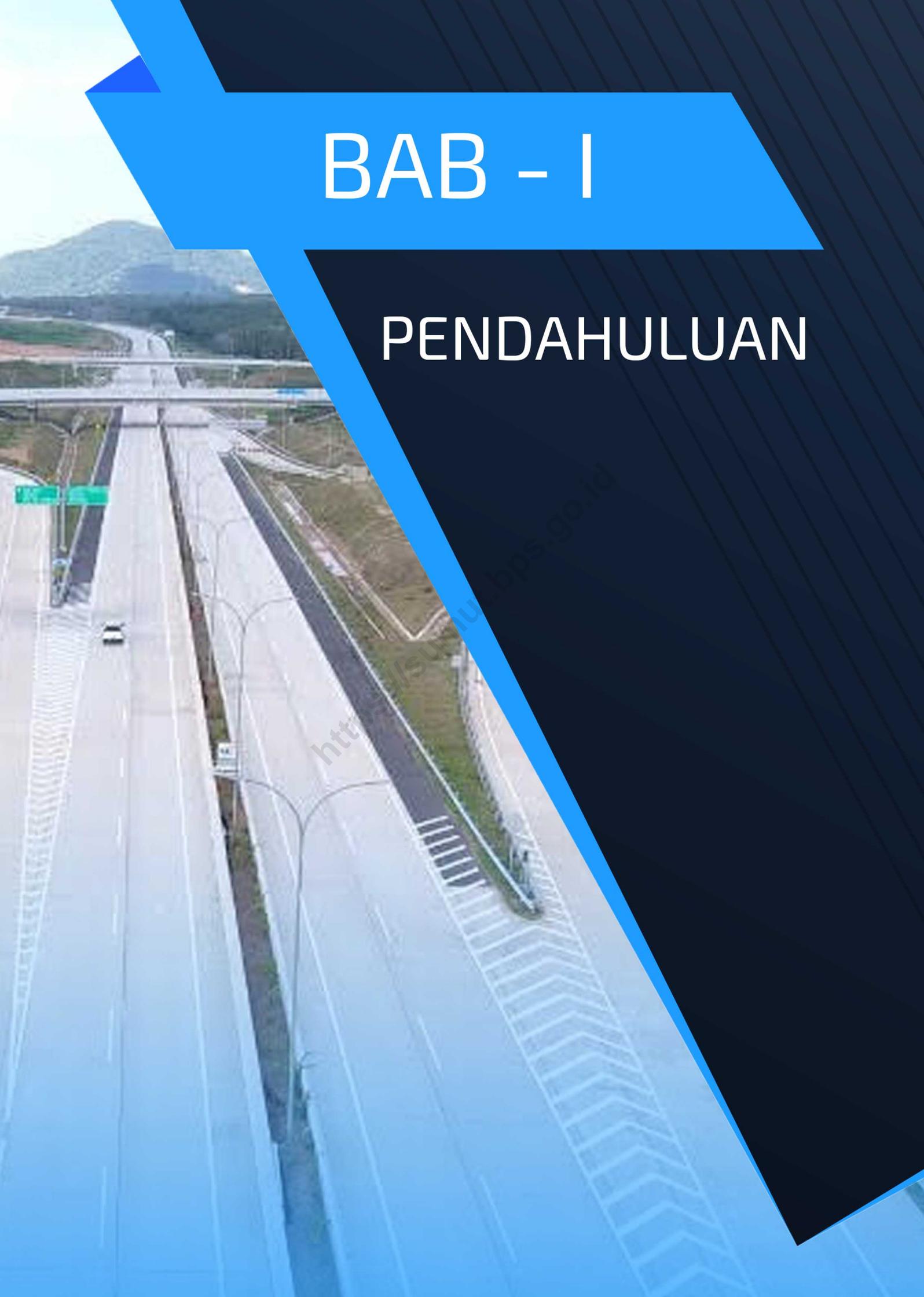
DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Perbandingan PDRB Provinsi Sumatera Utara ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017	33
Grafik 3.2. Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara ADHK 2010 Beberapa Komponen Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017	36
Grafik 3.3. Rasio Jumlah Penduduk dengan Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	48
Grafik 3.4. Laju Pertumbuhan Sub Komponen PMTB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017	50
Grafik 3.5. Perbandingan Perubahan Inventori Provinsi Sumatera Utara ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017...	52
Grafik 3.6. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara ADHB Tahun 2013-2017	56

<https://sumut.bps.go.id>

BAB - I

PENDAHULUAN



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. **Menurut Pendekatan Produksi,**

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB - II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan

10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. *Adjustment* dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Sebagai contoh : data hasil Survei Biaya Hidup (SBH) digunakan untuk *adjustment* kondisi rumah tangga di wilayah perkotaan.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$
jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$
jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) merupakan bagian dari pengeluaran lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan

lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;

- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan

- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa

yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PK-P Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi ADHB

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi ADHK

PK-P ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari PDRB komponen Pembentukan Modal Tetap (PMTB) Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*)

menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
 - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
 - g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
 - h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.

- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADHB atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHB 2010, maka PMTB ADHB tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK 2010.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-*deflate* PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB ADHK 2010 dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK 2010 terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK 2010 tersebut di "*reflate*" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK 2010 di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB ADHK 2010 adalah dengan cara men-"*deflate*" PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADHK 2010 diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan cara mendeflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan

pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjenk Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh

nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori ADHK 2010, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan *menginflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK 2010 dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor-Import Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB - III

TINJAUAN PEREKONOMIAN SUMATERA UTARA BERDASARKAN

**PDRB PENGELUARAN
2013 - 2017**



Perubahan struktur ekonomi Sumatera Utara akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2013 s.d 2017, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data PDRB Pengeluaran menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai nilai yang berfluktuasi. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Sumatera Utara digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Kajian atau analisis terhadap komponen PDRB, yaitu : konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT dan Pemerintah); Investasi (PMTB dan Inventori), dan net ekspor (ekspor dikurangi impor) bukan hanya dari arah perubahan struktur, tetapi juga dari sisi pertumbuhan. Dalam analisis ekonomi makro, ke tujuh komponen tersebut juga sering digunakan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi atau prediksi perekonomian. Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB SUMATERA UTARA MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Sumatera Utara menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Berdasarkan Tabel 3.1, nilai PDRB Sumatera Utara ADHB selama periode tahun 2013 s.d 2017 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

**Tabel 3.1. PDRB Provinsi Sumatera Utara ADHB
Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017**

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	251 415,64	281 431,38	306 071,86	333 511,73	364 082,12
2. Konsumsi LNPRT	4 675,82	5 053,86	5 258,70	5 708,82	6 058,24
3. Konsumsi Pemerintah	37 523,22	40 798,56	43 960,45	46 072,72	51 843,68
4. PMTB	150 091,47	164 701,34	182 367,64	198 592,88	213 362,36
5. Perubahan Inventori	7 728,37	10 437,92	13 119,11	9 047,44	8 053,87
6. Ekspor	187 898,48	213 584,16	210 230,99	239 219,35	257 125,86
7. Impor	169 869,00	194 052,26	189 286,74	203 758,78	216 456,64
Total PDRB	469 464,02	521 954,95	571 722,01	628 394,16	684 069,24

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK 2010, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Sama halnya dengan PDRB ADHB, Nilai PDRB ADHK 2010 juga menunjukkan peningkatan dari 398.727,14 miliar rupiah tahun 2013 menjadi 487.531,23 miliar rupiah ditahun 2017. Selama kurun waktu 2013-2017, gambaran tentang perkembangan ekonomi Sumatera Utara berdasarkan PDRB ADHK 2010 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2. PDRB Provinsi Sumatera Utara
ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Tahun 2013-2017**

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	204 962,97	215 720,14	225 907,47	237 147,36	249 298,16
2. Konsumsi LNPRT	4 329,80	4 533,95	4 515,28	4 683,87	4 836,36
3. Konsumsi Pemerintah	29 453,58	30 308,58	31 050,20	30 933,13	32 718,10
4. PMTB	120 436,36	124 148,57	128 952,21	135 207,98	143 203,73
5. Perubahan Inventori	6 472,27	9 661,93	10 958,43	7 797,44	6 888,38
6. Ekspor	178 463,32	191 872,58	189 848,62	194 929,51	207 288,02
7. Impor	145 391,15	156 672,44	150 276,35	146 923,82	156 701,51
Total PDRB	398 727,14	419 573,31	440 955,85	463 775,46	487 531,23

*) Angka Sementara

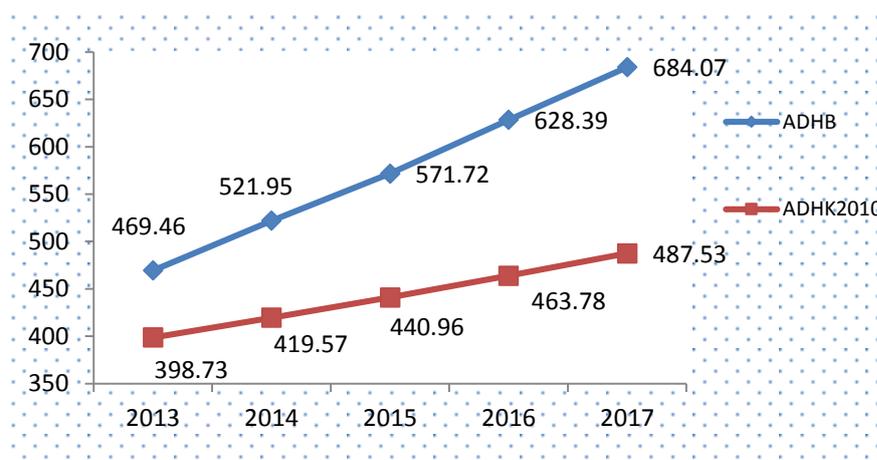
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Grafik 3.1 menggambarkan bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK 2010. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK 2010 pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

**Grafik 3.1. Perbandingan PDRB Provinsi Sumatera Utara
ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2013 - 2017**

(Triliun Rp)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3.3. Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Utara ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2017

Komponen Pengeluaran	(persen)				
	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	53,55	53,92	53,54	53,07	57,94
2. Konsumsi LNPRT	1,00	0,97	0,92	0,91	0,96
3. Konsumsi Pemerintah	7,99	7,82	7,69	7,33	8,25
4. PMTB	31,97	31,55	31,90	31,60	33,95
5. Perubahan Inventori	1,65	2,00	2,29	1,44	1,28
6. Ekspor	40,02	40,92	36,77	38,07	40,92
7. Impor	36,18	37,18	33,11	32,43	34,45
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2013 – 2017, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Sumatera Utara sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga sekitar 53 s.d 58 persen,. Ekspor juga mempunyai peran yang besar, karena sekitar 37 s.d 41 persen produk Provinsi Sumatera Utara mampu menembus pasar internasional dan antar daerah.

Demikian juga dengan impor, sekitar 32 s.d 37 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 32 s.d 34 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 7 hingga 8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain,

pada tahun 2013 - 2017 perdagangan internasional Provinsi Sumatera Utara yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor sedikit lebih tinggi dari nilai impor. Kecenderungan perdagangan internasional Sumatera Utara dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi surplus atau lebih banyak barang/produk dari Sumatera Utara yang dipasarkan ke luar daerah (antar provinsi dan luar negeri) dibanding dengan impor.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2013 s.d 2017 mengalami perlambatan. Seperti yang tertera di Tabel 3.4. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 6,07 persen, sebaliknya terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 5,10 persen.

Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2017

Komponen Pengeluaran (1)	(persen)				
	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016*) (5)	2017**) (6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,04	5,25	4,72	4,98	5,12
2. Konsumsi LNPRT	4,94	4,72	(0,41)	3,73	3,26
3. Konsumsi Pemerintah	4,01	2,90	2,45	(0,38)	5,77
4. PMTB	5,18	3,08	3,87	4,85	5,91
5. Perubahan Inventori	(8,78)	49,28	13,42	(28,85)	(11,66)
6. Ekspor	(5,30)	7,51	(1,05)	2,68	6,34
7. Impor	(10,09)	7,76	(4,08)	(2,23)	6,65
Total PDRB	6,07	5,23	5,10	5,18	5,12

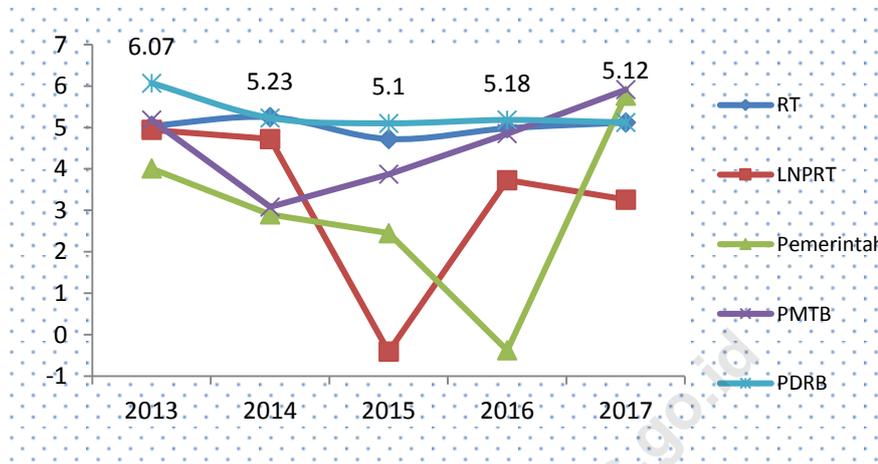
*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Grafik 3.2 menggambarkan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara serta beberapa komponen pengeluaran lain dengan pola masing-masing.

Grafik 3.2. Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara ADHK 2010 Beberapa Komponen Menurut Pengeluaran Tahun 2013 - 2017



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dalam Tabel 3.5.

¹ Indeks perkembangan

**Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Provinsi Sumatera Utara
Menurut Pengeluaran
Tahun 2013 - 2017**

(persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	122,66	130,46	135,49	140,63	146,04
2. Konsumsi LNPRT	107,99	111,47	116,46	121,88	125,26
3. Konsumsi Pemerintah	127,40	134,61	141,58	148,94	158,46
4. PMTB	124,62	132,66	141,42	146,88	148,99
5. Perubahan Inventori	119,41	108,03	119,72	116,03	116,92
6. Ekspor	105,29	111,32	110,74	122,72	124,04
7. Impor	116,84	123,86	125,96	138,68	138,13
Total PDRB	117,74	124,40	129,66	135,50	140,31

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Berdasarkan Tabel 3.6, tercermin bahwa dalam kurun waktu 2013 – 2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK 2010), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	251 415,64	281 431,38	306 071,86	333 511,73	364 082,12
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	204 962,97	215 720,14	225 907,47	237 688,14	249 298,16
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	53,55	53,92	53,54	53,07	57,94
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB 2010	79 072,81	87 380,54	93 967,64	101 195,99	109 242,25
b. ADHK 2010	64 462,97	66 978,11	69 356,23	71 956,58	74 801,50
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB 2010	18 500,05	20 442,46	21 959,52	23 648,43	25 527,86
b. ADHK 2010	15 081,90	15 669,36	16 208,03	16 815,49	17 479,71
Pertumbuhan²					
a. Total konsumsi RT	5,04	5,25	4,72	4,98	5,12
b. Per rumah tangga	3,63	3,90	3,55	3,75	3,95
c. Perkapita	3,63	3,90	3,44	3,75	3,95
Jumlah rumah tangga (<i>unit</i>)	3 179 546	3 220 756	3 257 205	3 295 701	3 332 796
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	13 590	13 767	13 938	14 103	14 262

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2013 hingga 2016 sekitar 54 persen. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan secara signifikan menjadi sebesar 57,94 persen.

Pasca krisis ekonomi tahun 1998/1999 atau masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya. Peningkatan penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor), juga turut menjadi pendorong meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2013, secara umum setiap rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara menghabiskan dana sekitar 79.072,81 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 87.380,54 ribu rupiah (2014); 93.967,64 ribu rupiah (2015); 101.195,99 ribu rupiah (2016) dan menjadi 109.242,25 ribu rupiah (2017).

Sementara itu, berdasarkan PDRB ADHK 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga selama periode 2013 s.d 2017 tumbuh pada kisaran 3 s.d 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,95 persen. Pada sisi lain, rata-rata pertumbuhan konsumsi perkapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan, baik ADHB maupun ADHK 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Sumatera Utara meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi perkapita secara “riil” berkisar antara 3 s.d 4 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK 2010 sebesar 5,04 persen pada tahun 2013 kemudian tumbuh hingga 5,25 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 mengalami perlambatan sebesar 4,72 persen, selanjutnya konsumsi rumah tangga tumbuh stabil hingga tahun 2017 sebesar 5,12 persen. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 4 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 3.7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017³

Kelompok Konsumsi	(persen)				
	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	41,21	41,30	41,17	41,30	41,25
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,15	4,10	4,14	4,13	4,09
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,88	13,71	14,05	14,13	14,08
d. Kesehatan & Pendidikan	7,04	7,17	7,18	7,18	7,19
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	21,97	21,74	21,32	21,06	20,91
f. Hotel dan Restoran	8,59	8,82	8,84	8,92	8,93
g. Lainnya	3,16	3,17	3,30	3,28	3,55
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, kontribusi konsumsi bukan makanan terhadap total konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan selama periode tersebut cenderung berada pada kisaran yang sedikit menurun, yaitu 41,21 persen (2013); 41,30 persen (2014); 41,17 persen (2015); 41,30 persen (2016) dan 41,25 persen (2017).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan pergeseran yang relatif kecil antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan. Walaupun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

³Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Tabel 3.8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017

Kelompok Konsumsi	(persen)				
	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,76	5,34	5,31	5,63	5,55
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,39	5,03	4,14	5,01	5,18
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,29	4,25	4,42	4,48	4,72
d. Kesehatan & Pendidikan	4,76	5,23	3,99	4,46	4,57
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	5,30	5,38	4,27	4,45	5,05
f. Hotel dan Restoran	7,46	6,39	4,39	3,88	5,16
g. Lainnya	4,53	4,93	4,58	5,78	2,76

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan mengalami fluktuasi. Tahun 2015 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan hingga 5,63 persen. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami perlambatan hingga pertumbuhannya sebesar 5,55 persen. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Pada tahun 2013 hingga 2014, laju pertumbuhan tertinggi pada sub kelompok hotel dan restoran tumbuh berkisar 6 s.d 7 persen. Tahun 2017, laju pertumbuhan didominasi oleh sub kelompok makanan, minuman selain restoran tumbuh sebesar 5,55 persen, diikuti dengan pakaian dan alas kaki yaitu 5,18 persen.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 3.9, menunjukkan secara umum peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman dan rokok mulai terjadi pada tahun 2016 sebesar 3,48 persen, namun mengalami perlambatan kembali pada tahun 2017 sebesar 3,30 persen. Peningkatan harga pada kelompok kesehatan dan pendidikan serta kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya mulai terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2017. Peningkatan harga pada kelompok kesehatan dan pendidikan

menjadi sebesar 4,66 persen pada tahun 2017. Peningkatan harga pada kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya menjadi sebesar 3,21 persen pada tahun 2017.

Tabel 3.9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017⁴

Kelompok Konsumsi	(persen)				
	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,34	6,50	2,94	3,48	3,30
b. Pakaian dan Alas Kaki	8,53	5,11	5,55	3,61	2,62
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,31	5,99	6,73	4,90	3,86
d. Kesehatan & Pendidikan	7,77	8,26	4,78	4,22	4,66
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	7,72	5,12	2,29	3,05	3,21
f. Hotel dan Restoran	6,14	8,06	4,42	5,90	3,89
g. Lainnya	8,79	7,07	8,37	2,33	14,92

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi. Tabel 3.10 menunjukkan proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB yang kecil.

Berdasarkan Tabel 3.10, terlihat bahwa pengeluaran konsumsi LNPRT ADHB pada periode 2013-2017 mengalami peningkatan. Namun proporsi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan. Proporsi yang tertinggi terjadi pada 2013 sebesar 1,00 persen, mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi sebesar 0,96 persen.

⁴Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Tabel 3.10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	4 675,82	5 053,86	5 258,70	5 708,82	6 058,24
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	4 329,80	4 533,95	4 515,28	4 683,87	4 836,36
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,00	0,97	0,92	0,91	0,96
Pertumbuhan	4,94	4,72	(0,41)	3,73	3,26

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Bila dilihat dari pendapatan riil, maka konsumsi LNPRT ADHK mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 hingga tahun 2015 konsumsi LNPRT mengalami perlambatan. Pada tahun 2013 sebesar 4.329,80 miliar rupiah, pada tahun 2014 sebesar 4.533,95 miliar rupiah, pada tahun 2015 menjadi sebesar 4.515,28 miliar rupiah atau tumbuh sebesar minus 0,41 persen rupiah. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3,73 persen, namun mengalami perlambatan kembali pada tahun 2017 sebesar 3,26 persen atau menjadi sebesar 4.836,36 miliar rupiah.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Provinsi

Sumatera Utara serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 37.523,22 miliar rupiah, terus meningkat pada tahun selanjutnya, yaitu 40.798,56 miliar rupiah (2014); 43.960,45 miliar rupiah (2015); 46.072,72 miliar rupiah (2016) dan mencapai 51.843,68 miliar rupiah pada tahun 2017. Disisi lain, pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK 2010 mengalami peningkatan hingga tahun 2015 yaitu sebesar 31.050,20 miliar rupiah namun pada tahun 2016 turun menjadi sebesar 30.933,13 miliar rupiah, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 menjadi sebesar 32.718,10 miliar rupiah.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB tahun 2013 s.d tahun 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 proporsi konsumsi sebesar 7,99 persen, kemudian turun menjadi sebesar 7,82 persen (2014); 7,69 persen (2015) dan menjadi 7,33 persen (tahun 2016). Penurunan peranan tersebut disebabkan pertumbuhan pengeluaran akhir pemerintah selama kurun waktu tersebut berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Namun pada tahun 2017 proporsi pengeluaran akhir pemerintah meningkat menjadi sebesar 8,25 persen.

Pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah perkapita ADHB sebesar 2.761,09 ribu rupiah, terus meningkat pada tahun selanjutnya, yaitu 2.963,50 ribu rupiah (2014); 3.154,00 ribu rupiah (2015); 3.266,89 ribu rupiah (2016) dan mencapai 3.676,10 ribu rupiah pada tahun 2017.

**Tabel 3.11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	37 523,22	40 798,56	43 960,45	46 072,72	51 843,68
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	29 453,58	30 308,58	31 050,20	30 933,13	32 718,10
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	7,99	7,82	7,69	7,33	8,25
Konsumsi Pemerintah per- kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	2 761,09	2 963,50	3 154,00	3 266,89	3 676,10
b. ADHK 2010	2 167,30	2 201,54	2 227,74	2 193,39	2 294,05
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (Ribu Rp)					
a. ADHB	154 785,33	164 546,15	205 649,47	190 695,17	215 913,67
b. ADHK 2010	121 497,62	122 238,63	145 254,58	128 032,35	136 261,26
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	4,01	2,90	2,45	(0,38)	5,77
b. Konsumsi perkapita	2,62	1,58	1,19	(1,54)	4,59
c. Konsumsi per pegawai	6,33	0,61	18,83	(11,86)	6,43
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁶	242 421	247 946	213 764	241 604	240 113
Jumlah penduduk (000 org)	13 590	13 767	13 938	14 103	14 262

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2013 s.d 2015, rata-rata konsumsi pemerintah perkapita ADHK 2010 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun, dengan masing-masing senilai 2.167.30 ribu rupiah (2013); 2.201,54 ribu rupiah (2014) dan mencapai 2.227,74 ribu rupiah (2015). Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi sebesar 2.193,39 ribu rupiah dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 menjadi sebesar 2.294,05 ribu rupiah. Hal ini diikuti juga dengan laju pertumbuhan yang melambat sepanjang tahun 2013 yakni sebesar 2,62 persen hingga menjadi sebesar minus 1,54 persen pada tahun 2016. Moratorium PNS serta berbagai kebijakan efisiensi belanja pemerintah ikut mendorong terjadinya perlambatan tersebut. Kondisi ini juga sejalan dengan laju pertumbuhan

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

⁶ Tidak termasuk polisi dan militer

konsumsi per pegawai pemerintah yang cenderung melambat. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 6,33 persen melambat menjadi 0,61 persen tahun 2014. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan mengalami peningkatan menjadi 18,83 persen dan mengalami perlambatan hingga minus 11,86 persen.

Pertumbuhan yang melambat pada pengeluaran konsumsi akhir pemerintah tergambar pula dengan jumlah pegawai pemerintah yang juga terus mengalami penurunan. Selama periode tahun 2013 s.d 2017 jumlah pegawai pemerintah mengalami penurunan yang berfluktuasi. Jumlah pegawai pemerintah berjumlah 242.421 orang (2013); 247.946 orang (2014); 213.764 orang (2015); 241.604 orang (2016) dan 240.113 orang (2017). Sehingga dalam kurun waktu 2013 - 2017, secara total terjadi pengurangan jumlah pegawai pemerintah sebanyak 2.308 orang atau turun sebesar 0,95 persen dari tahun 2013. Penurunan tersebut di antaranya disebabkan oleh kebijakan moratorium pegawai di unit instansi pemerintah.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" menunjukkan perlambatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah.

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Sekitar 56 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti yang terdapat dalam tabel 3.12. Namun proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 proporsinya mencapai 56,33 persen, tahun 2014 turun menjadi 56,18 persen. Tahun 2015 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 mencapai 59,50 persen.

**Tabel 3.12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja)					
Pemerintah ⁷					
a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp.)	21 136,37	22 920,88	24 842,27	26 102,78	30 849,13
(%)	56,33	56,18	56,51	56,66	59,50
b. Konsumsi Individu (Miliar Rp.)	16 386,85	17 877,68	19 118,19	19 969,94	20 994,54
(%)	43,67	43,82	43,49	43,34	40,50
Total Konsumsi (Miliar Rp)	37 523,22	40 798,56	43 960,45	46 072,72	51 843,68
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan riil (ADHK2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	4,40	3,30	2,33	(0,14)	8,33
b. Konsumsi Individu	3,50	2,38	2,61	(0,70)	2,35
Total Konsumsi	4,01	2,90	2,45	(0,38)	5,77
Pertumbuhan indeks harga implisit ⁸ (%)					
a. Konsumsi Kolektif	7,85	4,98	5,92	5,22	9,10
b. Konsumsi Individu	8,33	6,56	4,22	5,19	2,72
Total Konsumsi	8,06	5,66	5,18	5,20	6,39

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Secara umum, proporsi konsumsi individu pada periode 2013-2017 cenderung menurun. Tahun 2013 nilai konsumsi individu sebesar 16.386,85 miliar rupiah atau sebesar 43,67 persen peranannya terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2017 proporsinya menurun menjadi 40,50 persen atau sebesar 20.994,54 miliar rupiah.

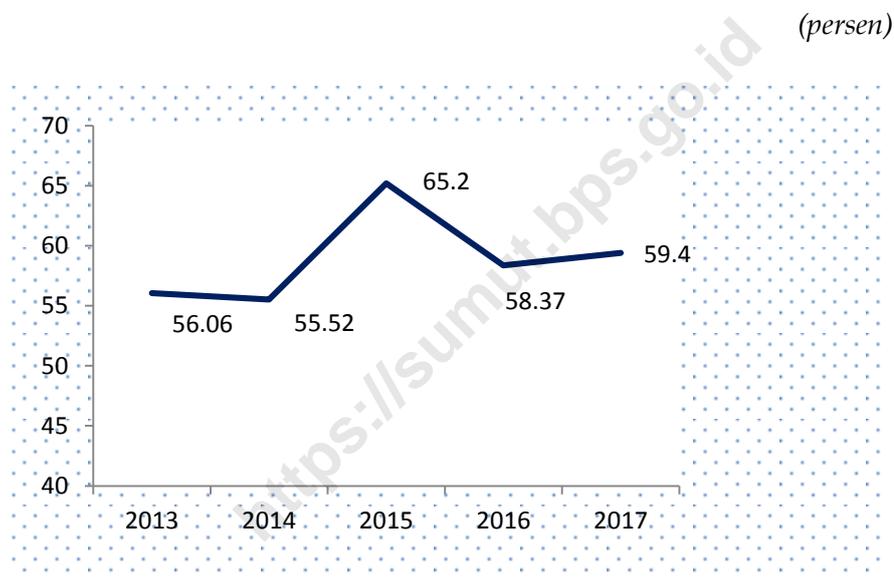
Hal lain yang patut dicermati adalah rasio, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah pegawai pemerintah. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah mengalami penurunan sebesar 242.421 orang (2013) menjadi 240.113 orang (2017). Hal ini tidak sejalan dengan

⁷Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁸Tingkat perubahan harga produk konsumsi

jumlah penduduk yang meningkat dari sejumlah 13.590 ribu orang pada tahun 2013 menjadi 14.262 ribu orang pada tahun 2017. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut cenderung mengalami peningkatan dengan masing-masing adalah 56,06 (2013), 55,52 (2014), 65,20 (2015), 58,37 (2016) dan 59,40 (2017). Hal ini berarti pada tahun 2013 setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 56 penduduk, maka pada tahun 2017 menjadi sekitar 59 penduduk.

Grafik 3.3. Rasio Jumlah Penduduk dengan Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2017



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Selain itu dapat juga diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹. Fungsi kapital adalah sebagai input

⁹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Tabel 3.13 menjelaskan bahwa pertumbuhan PMTB secara keseluruhan dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menurun dari 5,18 persen (2013) menjadi 5,91 (2017). Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen bervariasi antar tahunnya.

**Tabel 3.13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	150 091,47	164 701,34	182 367,64	198 592,88	213 362,36
b. ADHK (Miliar Rp)	120 436,36	124 148,57	128 952,21	135 207,98	143 203,73
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	31,97	31,55	31,90	31,60	33,95
Struktur PMTB ¹⁰					
a. Bangunan (Miliar Rp)	123 039,37	134 452,95	149 289,97	164 062,33	177 384,82
(%)	81,98	81,63	81,86	82,61	83,14
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	27 052,11	30 248,39	33 077,67	34 530,55	35 977,54
(%)	18,02	18,37	18,14	17,39	16,86
Total PMTB (Miliar Rp)	150 091,47	164 701,34	182 367,64	198 592,88	213 362,36
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan ¹¹ (%)					
a, Bangunan	6,13	3,48	4,32	5,63	6,31
b. Non Bangunan	1,19	1,31	1,84	1,26	4,02
Total PMTB	5,18	3,08	3,87	4,85	5,91

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pada tahun 2013, proporsi sub komponen bangunan sebesar 81,98 persen kemudian tahun 2014 mengalami

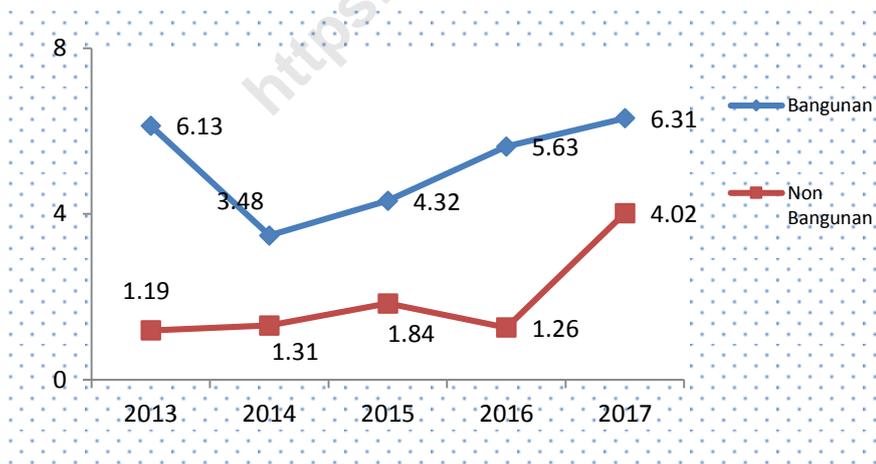
¹⁰Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

penurunan hingga mencapai 81,63 persen. Pada tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 83,14 persen. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhannya. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2013 sebesar 6,13 persen. Tahun 2014 laju pertumbuhan mengalami perlambatan hingga sebesar 3,48 persen, namun pada tahun 2015 hingga 2017 pertumbuhannya kembali membaik dengan mencapai angka pertumbuhan sebesar 6,31 persen.

Berbeda dengan sub komponen bangunan, proporsi sub komponen non bangunan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 18,37 persen. Proporsi sub komponen non bangunan tahun 2015 sebesar 18,14 atau sebesar 33.077,67 miliar rupiah, mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 35.977,54 miliar rupiah atau sebesar 16,86 persen dari total PMTB. Pertumbuhan sub komponen non bangunan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,19 persen. Namun pada tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,02 persen. Hal ini digambarkan pada Gambar 3.4.

Grafik 3.4. Laju Pertumbuhan Sub Komponen PMTB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2017



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi.

**Tabel 3.14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	7 728,37	10 437,92	13 119,11	9 047,44	8 053,87
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	6 472,27	9 661,93	10 958,43	7 797,44	6 888,38
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	1,65	2,00	2,29	1,44	1,28

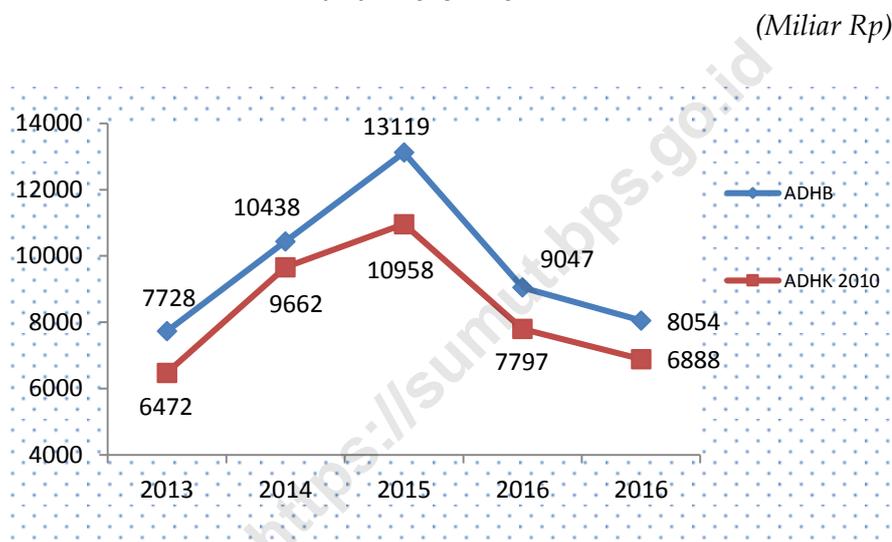
*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2013 perubahan inventori sebesar 7.728,37 miliar rupiah atau menyumbang sebesar 1,65 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2014 hingga 2015 proporsi perubahan inventori mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,00 persen (2014) dan 2,29 persen (2015) atau sebesar 10,437,92 miliar rupiah (2014) dan 13,119,11 miliar rupiah (2015). Pada tahun 2016 hingga tahun 2017 proporsinya turun hingga 1,28 persen atau sebesar 6.888,38 miliar rupiah. Pada Grafik 3.5 menggambarkan perubahan inventori ADHB dan ADHK 2010 pada tahun 2013 hingga tahun 2017.

Grafik 3.5. Perbandingan Perubahan Inventori Provinsi Sumatera Utara ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2013 - 2017



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 3.15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	187 898,48	213 584,16	210 230,99	239 219,35	257 125,86
b. ADHK (Miliar Rp)	178 463,32	191 872,58	189 848,62	194 929,51	207 288,02
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	40,02	40,92	36,77	38,07	40,92
Struktur Ekspor ¹²					
a. Barang (Miliar Rp)	183 129,43	207 962,63	203 192,22	231 070,13	248 874,26
(%)	97,46	97,37	96,65	96,59	96,79
b. Jasa (Miliar Rp)	4 769,05	5 621,53	7 038,78	8 149,22	8 251,60
(%)	2,54	2,63	3,35	3,41	3,21
Total Ekspor (%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan ¹³					
- Barang	(5,50)	7,64	(1,51)	2,90	6,48
- Jasa	4,74	2,12	19,96	(6,03)	0,51
- Total Ekspor	(5,30)	7,51	(1,05)	2,68	6,34

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Secara total, nilai ekspor tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 nilai ekspor Provinsi Sumatera Utara mencapai 187.898,48 miliar rupiah meningkat hingga menjadi 257.125,86 miliar rupiah pada tahun 2017. Meskipun secara nominal nilai ekspor mengalami peningkatan, tetapi proporsinya dalam PDRB cenderung berfluktuasi. Proporsi ekspor terhadap PDRB dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 proporsi ekspor sebesar 40,02 persen, tahun 2014 sebesar 40,92 persen, tahun 2015 sebesar 36,77 persen, tahun 2016 sebesar 38,07 persen dan tahun 2017 ekspor mampu menyumbang sebesar 40,92 persen terhadap total PDRB provinsi Sumatera Utara. Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor Provinsi Sumatera Utara berupa barang (rata-rata 97 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Ekspor barang memiliki proporsi dimasing-masing tahun sebesar 97,46 persen (2013); 97,37 persen (2014); 96,65 persen (2015); 96,59 persen (2016)

¹²Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

dan 96,79 persen (2017). Sedangkan ekspor jasa memiliki peranan terendah terhadap total ekspor barang dan jasa, masing-masing tahun sebesar 2,54 persen (2013); 2,63 persen (2014); 3,35 persen (2015); 3,41 persen (2016) dan 3,21 persen (2017).

Pertumbuhan riil total ekspor tahun 2013 hingga 2017 terjadi sangat berfluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,51 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang dan jasa. Sementara itu pertumbuhan minus terjadi pada tahun 2013 (minus 5,30 persen) serta tahun 2015 yang tumbuh sebesar minus 1,05 persen. Perlambatan tersebut disebabkan oleh gejolak harga beberapa komoditas ekspor di pasar internasional yang menurun tajam terutama untuk CPO dan karet yang merupakan komoditas ekspor unggulan Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan minus tersebut didorong dengan pertumbuhan ekspor barang pada tahun 2015 yang juga menunjukkan pertumbuhan negatif, yaitu minus 1,51 persen, sementara ekspor jasa 19,96 persen.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara

langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Provinsi Sumatera Utara di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 3.16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	169 869,00	194 052,26	189 286,74	203 758,78	216 456,64
b. ADHK (Miliar Rp)	145 391,15	156 672,44	150 276,35	146 923,82	156 701,51
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	36,18	37,18	33,11	32,43	34,45
Struktur Impor ¹⁴					
a. Barang (Miliar Rp)	160 944,79	183 777,58	178 210,35	192 022,39	204 229,40
(%)	94,75	94,71	94,15	94,24	94,35
b. Jasa (Miliar Rp)	8 924,21	10 274,69	11 076,39	11 736,39	12 227,24
(%)	5,25	5,29	5,85	5,76	5,65
Total Impor (%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan ¹⁵					
- Barang	(10,91)	8,08	(4,71)	(2,48)	6,58
- Jasa	9,30	1,64	8,70	2,29	7,89
- Total Impor	(10,09)	7,76	(4,08)	(2,23)	6,65

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3.16 di atas menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa ADHB Provinsi Sumatera Utara meningkat. Pada tahun 2013 nilai impor barang dan jasa mencapai 169.869,00 miliar rupiah, kemudian meningkat sebesar 194.052,26 miliar rupiah pada tahun 2014, terjadi penurunan pada tahun 2015 menjadi 189.286,74 miliar rupiah dan kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 203.758,78 miliar rupiah dan tahun 2017 menjadi sebesar 216.456,64 miliar rupiah. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2013 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 36,18 persen, meningkat sebesar 37,18 persen pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 proporsi impor

¹⁴Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

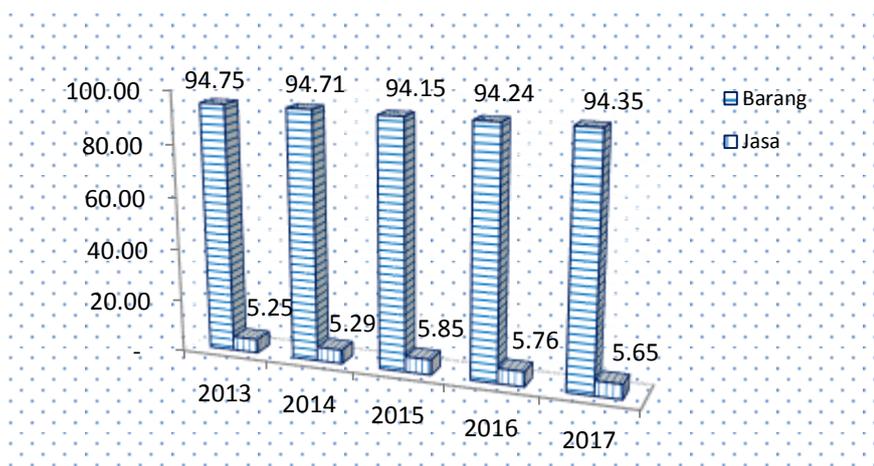
barang dan jasa mengalami penurunan yaitu sebesar 33,11 persen. Pada tahun 2016 hingga tahun 2017 proporsi impor barang dan jasa meningkat hingga 34,45 persen.

Pertumbuhan secara riil nilai impor juga mengalami fluktuasi. Tahun 2016 impor barang dan jasa mengalami perlambatan cukup tajam yakni sebesar minus 2,48 persen. Pertumbuhan minus tersebut didorong dengan pertumbuhan impor barang pada tahun 2016 yang juga menunjukkan pertumbuhan negatif, yaitu minus 2,23 persen. Sedangkan pada tahun 2017, pertumbuhan impor barang dan jasa meningkat sebesar 6,65 persen atau sebesar 156.701,51 miliar rupiah.

Menurut komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang yang memiliki porsi rata-rata sekitar 94 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa. Peranan impor barang pada tahun 2017 menjadi sebesar 94,35 persen menurun dibandingkan dengan peranan tahun 2013 sebesar 94,75 persen. Sedangkan impor jasa, pada tahun 2017 mempunyai peranan terhadap pembentukan nilai impor sebesar 5,65 persen meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 5,25 persen. Seperti yang digambarkan dalam gambar 3.6.

Grafik 3.6. Perkembangan Struktur Impor Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara ADHB Tahun 2013 - 2017

(persen)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

BAB - IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB

PROVINSI SUMATERA UTARA
MENURUT PENGELUARAN
2013 – 2017



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Berdasarkan series data PDRB pengeluaran, dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

PDRB per-kapita Sumatera Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seperti yang disajikan pada Tabel 4.1, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. PDRB perkapita pada harga berlaku secara kumulatif meningkat mulai tahun 2013 dari yang awalnya sebesar 34.544,81 ribu rupiah menjadi 47.963,99 ribu rupiah pada tahun 2017. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sumatera Utara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

**Tabel 4.1. PDRB dan PDRB Perkapita
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	469 464,02	521 954,95	571 722,01	628 394,16	684 069,49
- ADHK 2010	398 727,14	419 573,31	440 955,85	463 775,46	487 531,23
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	34 544,81	37 913,49	41 018,94	44 557,76	47 963,99
- ADHK 2010	29 339,75	30 476,74	31 636,95	32 885,09	34 183,58
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,65	3,88	3,81	3,95	3,95
Jumlah Penduduk (000 org)	13 590	13 767	13 938	14 103	14 262
Pertumbuhan	1,36	1,30	1,24	1,18	1,13

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Sementara itu pertumbuhan PDRB perkapita secara “riil” melambat selama kurun waktu 2013-2015. Tahun 2015, PDRB perkapita tumbuh sebesar 3,81 persen, sedangkan tahun 2013 tumbuh sebesar 4,65 persen. Namun pada tahun 2017, PDRB perkapita meningkat hingga sebesar 3,95 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang melambat. Tahun 2017, pertumbuhan penduduk sebesar 1,13 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang tumbuh sebesar 1,36 persen.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam pengeluaran PDRB Sumatera Utara (sekitar 50 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Sumatera Utara sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

**Tabel 4.2. Perbandingan PDRB Menurut Pengeluaran untuk
Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015 ⁾	2016 ⁾	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	251 415,64	281 431,38	306 071,86	333 511,73	364 082,12
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	187 898,48	213 584,16	210 230,99	239 219,35	257 125,86
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,34	1,32	1,46	1,39	1,42

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 1,34 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Pada tahun-tahun berikutnya, nilai rasio relatif sama yaitu dalam rentang 1,42 kali dari yang diekspor. Peningkatan rasio yang terjadi lebih disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, peningkatan yang relatif tajam juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio PDRB terhadap Impor merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar pengeluaran produk yang tersedia di wilayah domestik Sumatera Utara digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4.3. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015 ⁾	2016 ⁾	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	251 415,64	281 431,38	306 071,86	333 511,73	364 082,12
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	150 091,47	164 701,34	182 367,64	198 592,88	213 362,36
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,68	1,71	1,68	1,68	1,71

⁾ Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Sama halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB bervariasi, dari sebesar 1,68 pada tahun 2013 menjadi 1,71 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 rasionya turun menjadi 1,68 dan naik menjadi 1,71 pada tahun 2017. Hal ini terjadi karena berfluktuasinya pertumbuhan nilai investasi, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Dimaksud dengan konsumsi akhir adalah pengeluaran berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.4 menunjukkan sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 61 persen). Konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya namun proporsinya menurun hingga tahun 2016 menjadi sekitar 61,31 persen. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

Tabel 4.4. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013–2017

Uraian	2013	2014	2015)	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	251 415,64	281 431,38	306 071,86	333 511,73	364 082,12
b. LNPRT	4 675,82	5 053,86	5 258,70	5 708,82	6 058,24
c. Pemerintah	37 523,22	40 798,56	43 960,45	46 072,72	51 843,68
Jumlah	293 614,68	327 283,80	355 291,01	385 293,26	421 984,04
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	469 464,02	521 954,95	571 722,01	628 394,16	684 069,49
Proporsi	62,54	62,70	62,14	61,31	61,69

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Dalam kurun waktu 2013 hingga 2017, proporsi terbesar terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 62,70 persen. Sedangkan proporsi terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 61,31 persen.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Pada periode 2013-2015, secara umum ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB. Rasio yang paling tinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 1,30, sementara terendah tahun 2015 sebesar 1,15. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

**Tabel 4.5 Rasio Ekspor terhadap PMTB
Provinsi Sumatera Utara ADHB Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015 ⁾	2016 ⁾	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	187 898,48	213 584,16	210 230,99	239 219,35	257 125,86
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	150 091,47	164 701,34	182 367,64	198 592,88	213 362,36
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,25	1,30	1,15	1,20	1,21

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio PDRB terhadap Impor memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh propinsi lain. Jika rasionya besar berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya apabila angka rasionya kecil berarti ketergantungan terhadap produk impor tidak terlalu kuat.

**Tabel 4.6. Rasio PDRB terhadap Impor
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015 ⁾	2016 ⁾	2017 ^{**)}
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	469 464,02	521 954,95	571 722,01	628 394,16	684 069,49
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	169 869,00	194 052,26	189 286,74	203 758,78	216 456,64
Rasio PDRB terhadap Impor	2,76	2,69	3,02	3,08	3,16

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Rasio PDRB terhadap impor kurun waktu 2013 sebesar 2,76 mengalami penurunan menjadi 2,69 pada tahun 2014. Walaupun rasio masih relatif kecil yang berarti ketergantungan PDRB Sumatera Utara kepada impor masih cukup

tinggi. Rasio PDRB terhadap impor tahun 2015–2017 menunjukkan terjadinya peningkatan dari 2,69 menjadi 3,16. Peningkatan rasio menunjukkan bertambahnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 4.7. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ^{**)}
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	469 464,02	521 954,95	571 722,01	628 394,16	684 069,49
%	73,43	72,90	75,13	75,51	75,96
Total nilai Impor ADHB (Miliar Rp)	169 869,00	194 052,26	189 286,74	203 758,78	216 456,64
%	26,57	27,10	24,87	24,49	24,04
Total Permintaan Akhir¹⁾ (Miliar Rp)	639 333,01	716 007,22	761 008,75	832 152,94	900 526,13
%	(100,00%)	(100,00%)	(100,00%)	(100,00%)	(100,00%)

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Tabel 4.7, terlihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan daerah lain, dengan rentang 24 s.d 27 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 70 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 639.333,01 miliar rupiah pada tahun 2013 menjadi sebesar 900.526,13 miliar rupiah pada tahun 2017.

¹⁾ Termasuk diskrepansi statistik

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik pada tahun 2013 sebesar 469.464,02 miliar rupiah (2013); 521.954,95 miliar rupiah (2014); 571.722,01 miliar rupiah (2015); 628.394,16 miliar rupiah (2016) dan 684.069,49 miliar rupiah (2017). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 169.869,00 miliar rupiah (2013); 194.052,26 miliar rupiah (2014); 189.286,74 miliar rupiah (2015); 203.758,78 miliar rupiah (2016) dan 216.456,64 miliar rupiah (2017).

4.8 *NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)*

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) serta dari daerah lain dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 4.8. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	187 898,48	213 584,16	210 230,99	239 219,35	257 125,86
Nilai Impor (ADHB)(Miliar Rp)	169 869,00	194 052,26	189 286,74	203 758,78	216 456,64
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	18 029,48	19 531,89	20 944,25	35 460,57	40 669,22
Rasio ekspor thdp Impor	1,11	1,10	1,11	1,17	1,19

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selama periode 2013-2017 posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Sumatera Utara dengan luar negeri dan antar pulau, selalu menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Sumatera Utara selalu dalam posisi surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “**tabungan**”. Surplus perdagangan Sumatera Utara yang terjadi antara tahun 2013 sampai dengan 2017 tercatat masing-masing sebesar 18.029,48 miliar rupiah (2013), 19.531,89 miliar rupiah (2014), 20.944,25 miliar rupiah (2015), 35.460,57 miliar rupiah (2016) dan 40.669,22 miliar rupiah (2017).

Rasio ekspor terhadap impor cenderung menurun dari tahun 2013-2014. Pada tahun 2013 rasionya sebesar 1,11 menjadi sekitar 1,10 pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 hingga tahun 2017 rasio ekspor terhadap impor meningkat menjadi 1,19.

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio Perdagangan Internasional (RPI) menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI

berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Tabel 4.9. Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015)	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	105 269,29	113 771,82	107 872,50	109 448,92	132 941,64
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	63 840,80	69 423,36	64 494,65	64 134,58	72 249,26
(X - M) (Miliar Rp)	41 428,49	44 348,46	43 377,85	45 314,34	60 692,38
(X +M) (Miliar Rp)	169 110,09	183 195,18	172 367,15	173 583,49	205 190,91
R P I	0,24	0,24	0,25	0,26	0,30

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Data pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013-2017, posisi ekspor LN selalu lebih tinggi dari impor LN. Kecenderungan nilai ekspor LN pada periode tersebut terus meningkat dari 105.269,29 miliar rupiah pada tahun 2013 menjadi 132.941,64 miliar rupiah pada tahun 2017. Begitu pula dengan kecenderungan impor LN, yang mempunyai pola hampir sama dengan ekspor LN, cenderung meningkat setiap tahun.

Rasio Perdagangan Internasional Sumatera Utara pada periode 2013-2017 mengindikasikan bahwa perdagangan internasionalnya selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, meskipun dengan rasio yang cukup kecil antara 0,24 hingga 0,30.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 4.10. Incremental Capital Output Ratio
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015)	2016*)	2017**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	398 727,14	419 573,31	440 955,85	463 775,46	487 531,23
Perubahan (miliar rupiah)	22 803,00	20 846,17	21 382,54	22 819,61	23 755,77
PMTB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	120 436,36	124 148,57	128 952,21	135 207,98	143 203,73
ICOR	5,28	5,96	6,03	5,93	6,03

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.10 menunjukkan besaran ICOR Sumatera Utara. Pada tahun 2013 ICOR Sumatera Utara sebesar 5,28, mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi sebesar 6,03 persen. Pada tahun 2016 ICOR menurun menjadi 5,93 persen dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi sebesar 6,03 persen. Dari besaran ICOR 2017 sebesar 6,03 tersebut dapat dikatakan bahwa di provinsi Sumatera Utara untuk setiap peningkatan output sebesar 1 miliar rupiah diperlukan penambahan kapital sebesar 6,03 miliar rupiah.

BAB - V

PENUTUP



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 s.d 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku pengeluaran barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 s.d 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan disini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Sumatera Utara terhadap ekonomi negara dan daerah lain.

<https://sumut.bps.go.id>

BAB - VI

TABEL-TABEL



Tabel 6.1
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara ADHB
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) 2013-2017

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	251 415 642,84	281 431 384,00	306 071 858,51	333 511 725,39	364 082 119,12
	a. Makanan Minuman dan Rokok	103 608 251,40	116 242 775,60	126 017 370,80	137 743 129,42	150 178 465,88
	b. Pakaian dan Alas Kaki	10 444 004,82	11 529 780,66	12 674 035,87	13 789 821,56	14 884 539,40
	c. Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	34 908 796,71	38 573 111,99	42 990 631,41	47 117 613,76	51 249 750,29
	d. Kesehatan dan Pendidikan	17 707 668,04	20 173 682,01	21 980 215,83	23 930 612,70	26 190 895,07
	e. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	55 225 323,46	61 179 598,54	65 251 957,26	70 231 580,72	76 146 256,57
	f. Hotel dan Restoran	21 585 244,25	24 815 747,58	27 052 071,61	29 759 650,49	32 513 169,18
	g. Lainnya	7 936 354,16	8 916 687,62	10 105 575,72	10 939 316,74	12 919 042,72
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4 675 824,11	5 053 855,81	5 258 701,66	5 708 823,29	6 058 240,70
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	37 523 215,11	40 798 560,90	43 960 453,55	46 072 715,84	51 843 679,31
	a. Konsumsi Kolektif	21 136 365,75	22 920 878,59	24 842 265,66	26 102 779,52	30 849 134,75
	b. Konsumsi Individu	16 386 849,36	17 877 682,31	19 118 187,89	19 969 936,32	20 994 544,57
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	150 091 474,78	164 701 339,98	182 367 638,03	198 592 880,92	213 362 357,91
	a. Bangunan	123 039 368,96	134 452 946,44	149 289 971,11	164 062 328,23	177 384 821,68
	b. Non-Bangunan	27 052 105,82	30 248 393,54	33 077 666,92	34 530 552,69	35 977 536,22
5	Perubahan Inventori	7 728 374,69	10 437 916,29	13 119 108,12	9 047 441,96	8 053 874,57
6	Ekspor	187 898 482,54	213 584 158,22	210 230 990,44	239 219 352,82	257 125 858,24
	a. Barang	183 129 429,45	207 962 633,01	203 192 215,36	231 070 129,00	248 874 260,88
	b. Jasa	4 769 053,09	5 621 525,21	7 038 775,07	8 149 223,81	8 251 597,36
7	Impor	169 868 998,53	194 052 263,37	189 286 741,55	203 698 783,91	216 456 641,37
	a. Barang	160 944 792,42	183 777 578,11	178 210 351,13	191 962 394,39	204 229 400,36
	b. Jasa	8 924 206,11	10 274 685,27	11 076 390,42	11 736 389,52	12 227 241,01
	PDRB	469 464 015,54	521 954 951,83	571 722 008,76	628 394 156,32	684 069 488,47

Tabel 6.2
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara ADHK 2010
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2013-2017

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016 [*]	2017 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	204 962 973,31	215 720 143,13	225 907 466,20	237 147 363,27	249 298 155,74
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	86 203 395,33	90 810 544,48	95 632 832,19	101 015 836,27	106 619 256,93
b.	Pakaian dan Alas Kaki	9 152 888,03	9 613 657,18	10 012 067,56	10 513 583,19	11 057 953,17
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	28 617 720,35	29 833 249,67	31 152 471,04	32 549 543,36	34 086 640,96
d.	Kesehatan dan Pendidikan	14 801 274,72	15 575 670,67	16 196 433,07	16 918 960,99	17 692 284,87
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	43 126 421,35	45 447 561,61	47 387 557,56	49 495 901,72	51 995 505,15
f.	Hotel dan Restoran	16 508 657,60	17 563 790,79	18 335 407,79	19 046 990,56	20 029 969,57
g.	Lainnya	6 552 615,93	6 875 668,73	7 190 697,00	7 606 547,19	7 816 545,08
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4 329 796,06	4 533 947,87	4 515 276,92	4 683 867,25	4 836 359,67
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	29 453 575,21	30 308 580,52	31 050 200,59	30 933 126,92	32 718 099,02
a.	Konsumsi Kolektif	16 771 025,24	17 324 567,63	17 727 612,38	17 703 152,11	19 177 538,26
b.	Konsumsi Individu	12 682 549,97	12 984 012,89	13 322 588,21	13 229 974,81	13 540 560,76
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	120 436 363,47	124 148 573,21	128 952 212,26	135 207 978,12	143 203 726,39
a.	Bangunan	98 211 954,66	101 633 218,63	106 022 588,51	111 989 349,91	119 050 610,92
b.	Non-Bangunan	22 224 408,81	22 515 354,58	22 929 623,75	23 218 628,21	24 153 115,47
5	Perubahan Inventori	6 472 267,97	9 661 925,24	10 958 434,00	7 797 441,55	6 888 383,92
6	Ekspor	178 463 316,83	191 872 580,78	189 848 616,66	194 929 510,69	207 288 018,48
a.	Barang	174 519 082,75	187 844 622,91	185 016 688,71	190 389 103,92	202 724 389,79
b.	Jasa	3 944 234,09	4 027 957,87	4 831 927,96	4 540 406,78	4 563 628,69
7	Impor	145 391 150,05	156 672 442,07	150 276 354,16	146 923 822,95	156 701 511,35
a.	Barang	138 184 532,49	149 347 457,48	142 314 212,83	138 779 283,70	147 914 683,86
b.	Jasa	7 206 617,56	7 324 984,60	7 962 141,33	8 144 539,25	8 786 827,50
	PDRB	398 727 142,80	419 573 308,67	440 955 852,47	463 775 464,86	487 831 231,87

Tabel 6.3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara
ADHB Menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Persen)

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016 ^(*)	2017 ^(**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	53,55	53,92	53,54	53,07	53,22
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	22,07	22,27	22,04	21,92	21,95
	b. Pakaian dan Alas Kaki	2,22	2,21	2,22	2,19	2,18
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,44	7,39	7,52	7,50	7,49
	d. Kesehatan dan Pendidikan	3,77	3,87	3,84	3,81	3,83
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,76	11,72	11,41	11,18	11,13
	f. Hotel dan Restoran	4,60	4,75	4,73	4,74	4,75
	g. Lainnya	1,69	1,71	1,77	1,74	1,89
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,00	0,97	0,92	0,91	0,89
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,99	7,82	7,69	7,33	7,58
	a. Konsumsi Kolektif	4,50	4,39	4,35	4,15	4,51
	b. Konsumsi Individu	3,49	3,43	3,34	3,18	3,07
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,97	31,55	31,90	31,60	31,19
	a. Bangunan	26,21	25,76	26,11	26,11	25,93
	b. Non-Bangunan	5,76	5,80	5,79	5,50	5,26
5	Perubahan Inventori	1,65	2,00	2,29	1,44	1,18
6	Ekspor	40,02	40,92	36,77	38,07	37,59
	a. Barang	39,01	39,84	35,54	36,77	36,38
	b. Jasa	1,02	1,08	1,23	1,30	1,21
7	Impor	36,18	37,18	33,11	32,43	31,64
	a. Barang	34,28	35,21	31,17	30,56	29,86
	b. Jasa	1,90	1,97	1,94	1,87	1,79
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 6.4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara
ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Persen)

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	51,40	51,41	51,23	51,13	51,13
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	21,62	21,64	21,69	21,78	21,87
b.	Pakaian dan Alas Kaki	2,30	2,29	2,27	2,27	2,27
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,18	7,11	7,06	7,02	6,99
d.	Kesehatan dan Pendidikan	3,71	3,71	3,67	3,65	3,63
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,82	10,83	10,75	10,67	10,67
f.	Hotel dan Restoran	4,14	4,19	4,16	4,11	4,11
g.	Lainnya	1,64	1,64	1,63	1,64	1,60
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,09	1,08	1,02	1,01	0,99
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,39	7,22	7,04	6,67	6,71
a.	Konsumsi Kolektif	4,21	4,13	4,02	3,82	3,93
b.	Konsumsi Individu	3,18	3,09	3,02	2,85	2,78
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,21	29,59	29,24	29,15	29,37
a.	Bangunan	24,63	24,22	24,04	24,15	24,42
b.	Non-Bangunan	5,57	5,37	5,20	5,01	4,95
5	Perubahan Inventori	1,62	2,30	2,49	1,68	1,41
6	Ekspor	44,76	45,73	43,05	42,03	42,52
a.	Barang	43,77	44,77	41,96	41,05	41,58
b.	Jasa	0,99	0,96	1,10	0,98	0,94
7	Impor	36,46	37,34	34,08	31,68	32,14
a.	Barang	34,66	35,60	32,27	29,92	30,34
b.	Jasa	1,81	1,75	1,81	1,76	1,80
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 6.5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara
ADHB Menurut Pengeluaran (Persen), 2013-2017

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016 ^{a)}	2017 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12,87	11,94	8,76	8,97	9,17
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	12,44	12,19	8,41	9,30	9,03
	b. Pakaian dan Alas Kaki	14,38	10,40	9,92	8,80	7,94
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,91	10,50	11,45	9,60	8,77
	d. Kesehatan dan Pendidikan	12,90	13,93	8,95	8,87	9,45
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	13,43	10,78	6,66	7,63	8,42
	f. Hotel dan Restoran	14,06	14,97	9,01	10,01	9,25
	g. Lainnya	13,71	12,35	13,33	8,25	18,10
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,72	8,08	4,05	8,56	6,12
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,39	8,73	7,75	4,80	12,53
	a. Konsumsi Kolektif	12,60	8,44	8,38	5,07	18,18
	b. Konsumsi Individu	12,12	9,10	6,94	4,46	5,13
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,15	9,73	10,73	8,90	7,44
	a. Bangunan	13,88	9,28	11,04	9,90	8,12
	b. Non-Bangunan	15,36	11,82	9,35	4,39	4,19
5	Perubahan Inventori	7,05	35,06	25,69	(31,04)	(10,98)
6	Ekspor	11,30	13,67	(1,57)	13,79	7,49
	a. Barang	11,19	13,56	(2,29)	13,72	7,71
	b. Jasa	15,67	17,88	25,21	15,78	1,26
7	Impor	12,64	14,24	(2,46)	7,65	6,23
	a. Barang	12,06	14,19	(3,03)	7,75	6,23
	b. Jasa	24,25	15,13	7,80	5,96	4,18
	PDRB	12,55	11,18	9,53	9,91	8,86

Tabel 6.6
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara
ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2013-2017

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,04	5,25	4,72	4,98	5,12
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	4,76	5,34	5,31	5,63	5,55
b.	Pakaian dan Alas Kaki	5,39	5,03	4,14	5,01	5,18
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,29	4,25	4,42	4,48	4,72
d.	Kesehatan dan Pendidikan	4,76	5,23	3,99	4,46	4,57
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,30	5,38	4,27	4,45	5,05
f.	Hotel dan Restoran	7,46	6,39	4,39	3,88	5,16
g.	Lainnya	4,53	4,93	4,58	3,78	2,76
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,94	4,72	(0,41)	3,73	3,26
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,01	2,90	2,45	(0,38)	5,77
a.	Konsumsi Kolektif	4,40	3,30	2,33	(0,14)	8,33
b.	Konsumsi Individu	3,50	2,38	2,61	(0,70)	2,35
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,18	3,08	3,87	4,85	5,91
a.	Bangunan	6,13	3,48	4,32	5,63	6,31
b.	Non-Bangunan	1,19	1,31	1,84	1,26	4,02
5	Perubahan Inventori	(8,78)	49,28	13,42	(28,85)	(11,66)
6	Ekspor	(5,30)	7,51	(1,05)	2,68	6,34
a.	Barang	(5,50)	7,64	(1,51)	2,90	6,48
b.	Jasa	4,74	2,12	19,96	(6,03)	0,51
7	Impor	(10,09)	7,76	(4,08)	(2,23)	6,65
a.	Barang	(10,91)	8,08	(4,71)	(2,48)	6,58
b.	Jasa	9,30	1,64	8,70	2,29	7,89
PDRB		6,07	5,23	5,10	5,18	5,12

Tabel 6.7
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Sumatera Utara ADHB Menurut Pengeluaran (2010=100),
2013-2017 (Persen)

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	140,98	157,81	171,63	187,02	204,16
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	134,44	150,83	163,51	178,73	194,86
b.	Pakaian dan Alas Kaki	132,80	146,61	161,15	175,34	189,26
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	139,39	154,02	171,66	188,14	204,64
d.	Kesehatan dan Pendidikan	141,31	160,99	175,40	190,97	209,01
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	151,68	168,04	179,22	192,90	209,14
f.	Hotel dan Restoran	154,48	177,60	193,60	212,98	232,68
g.	Lainnya	145,85	163,87	185,72	201,04	237,42
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	121,78	131,62	136,96	148,68	157,78
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	145,96	158,70	171,00	179,22	201,67
a.	Konsumsi Kolektif	145,48	157,77	170,99	179,67	212,34
b.	Konsumsi Individu	146,58	159,92	171,01	178,63	187,80
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	150,79	165,46	183,21	199,51	214,35
a.	Bangunan	148,94	162,75	180,71	198,59	214,72
b.	Non-Bangunan	159,81	178,69	195,41	203,99	212,54
5	Perubahan Inventori	62,87	84,92	106,73	73,60	65,52
6	Ekspor	140,31	159,49	156,98	178,63	192,00
a.	Barang	139,82	158,79	155,14	176,43	190,02
b.	Jasa	161,68	190,58	238,63	276,28	279,75
7	Impor	138,62	158,35	154,46	166,27	176,63
a.	Barang	138,48	158,12	153,33	165,22	175,72
b.	Jasa	141,19	162,55	175,24	185,68	193,45
	PDRB	141,80	157,65	172,68	189,80	206,61

Tabel 6.8
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Sumatera Utara ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, 2013-2017
(Persen)

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016 [*]	2017 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	114,93	120,97	126,68	132,98	139,79
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	111,85	117,83	124,09	131,07	138,34
b.	Pakaian dan Alas Kaki	116,38	122,24	127,31	133,68	140,61
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	114,27	119,12	124,39	129,97	136,11
d.	Kesehatan dan Pendidikan	118,12	124,30	129,25	135,02	141,19
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	118,45	124,83	130,15	135,94	142,81
f.	Hotel dan Restoran	118,15	125,70	131,22	137,00	143,35
g.	Lainnya	120,42	126,36	132,15	139,79	143,65
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	112,77	118,08	117,60	121,99	125,96
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	114,57	117,90	120,78	120,33	127,27
a.	Konsumsi Kolektif	115,44	119,25	122,02	121,85	132,00
b.	Konsumsi Individu	113,45	116,14	119,17	118,34	121,12
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	120,99	124,72	129,55	135,83	143,87
a.	Bangunan	118,88	123,02	128,34	135,56	144,11
b.	Non-Bangunan	131,29	133,01	135,46	137,16	142,68
5	Perubahan Inventori	52,65	78,60	89,15	63,43	56,04
6	Ekspor	133,26	143,27	141,76	145,56	154,78
a.	Barang	133,25	143,42	141,27	145,37	154,79
b.	Jasa	133,72	136,56	163,81	153,93	154,72
7	Impor	118,64	127,85	122,63	119,89	127,87
a.	Barang	118,89	128,50	122,45	119,40	127,26
b.	Jasa	114,02	115,89	125,97	128,85	139,02
	PDRB	120,43	126,73	133,18	140,08	147,25

Tabel 6.9
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran, 2013-2017 (Persen)

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016 ^(*)	2017 ^(*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	122,66	130,46	135,49	140,63	146,04
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	120,19	128,01	131,77	136,36	140,85
	b. Pakaian dan Alas Kaki	114,11	119,93	126,59	131,16	134,60
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	121,98	129,30	138,00	144,76	150,35
	d. Kesehatan dan Pendidikan	119,64	129,52	135,71	141,44	148,04
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	128,05	134,62	137,70	141,89	146,45
	f. Hotel dan Restoran	130,75	141,29	147,54	156,24	162,32
	g. Lainnya	121,12	129,68	140,81	143,81	165,28
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	107,99	111,47	116,46	121,88	125,26
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	127,40	134,61	141,58	148,94	158,46
	a. Konsumsi Kolektif	126,03	132,30	140,13	147,45	160,86
	b. Konsumsi Individu	129,21	137,69	143,50	150,94	155,05
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	124,62	132,66	141,42	146,88	148,99
	a. Bangunan	125,28	132,29	140,81	146,50	149,00
	b. Non-Bangunan	121,72	134,35	144,26	148,72	148,96
5	Perubahan Inventori	119,41	108,03	119,72	116,03	116,92
6	Ekspor	105,29	111,32	110,74	122,72	124,04
	a. Barang	104,93	110,71	109,82	121,37	122,76
	b. Jasa	120,91	139,56	145,67	179,48	180,81
7	Impor	116,84	123,86	125,96	138,68	138,13
	a. Barang	116,47	123,05	125,22	138,37	138,07
	b. Jasa	123,83	140,27	139,11	144,10	139,15
	PDRB	117,74	124,40	129,66	135,50	140,31

Tabel 6.10
Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran (2010=100), 2013-2017

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016 ^(*)	2017 ^(**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,46	6,36	3,85	3,80	3,85
a.	Makanan, Minuman, dan Rokok	7,34	6,50	2,94	3,48	3,30
b.	Pakaian dan Alas Kaki	8,53	5,11	5,55	3,61	2,62
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,31	5,99	6,73	4,90	3,86
d.	Kesehatan dan Pendidikan	7,77	8,26	4,78	4,22	4,66
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,72	5,12	2,29	3,05	3,21
f.	Hotel dan Restoran	6,14	8,06	4,42	5,90	3,89
g.	Lainnya	8,79	7,07	8,37	2,33	14,92
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,55	3,22	4,48	4,65	2,77
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,06	5,66	5,18	5,20	6,39
a.	Konsumsi Kolektif	7,85	4,98	5,92	5,22	9,10
b.	Konsumsi Individu	8,33	6,56	4,22	5,19	2,72
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,52	6,45	6,60	3,86	1,44
a.	Bangunan	7,31	5,60	6,44	4,04	1,71
b.	Non-Bangunan	14,00	10,37	7,38	3,09	0,16
5	Perubahan Inventori	17,36	(9,53)	10,82	(3,08)	0,77
6	Ekspor	17,52	5,73	(0,52)	10,82	1,08
a.	Barang	17,66	5,50	(0,80)	10,51	1,15
b.	Jasa	10,43	15,42	4,38	23,21	0,74
7	Impor	25,27	6,01	1,70	10,10	(0,40)
a.	Barang	25,78	5,65	1,76	10,49	(0,21)
b.	Jasa	13,68	13,27	(0,82)	3,59	(3,43)
	PDRB	6,11	5,66	4,22	4,50	3,56

DAFTAR PUSTAKA

<https://sumut.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, PDRB Menurut Penggunaan, berbagai seri, Medan.
2. _____, *Sumatera Dalam Angka*, berbagai seri, Medan.
3. Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran*, berbagai seri, Jakarta.
4. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
5. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.
6. Keuning J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
7. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
8. *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. , *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123
Telp. : (061) 8452343, Fax. : (061) 8452773
Homepage : <http://sumut.bps.go.id> E-mail : bps1200@bps.go.id

ISSN 2356-122X



9 772356 122002